

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Status Pengelolaan DAS Garang di Kota Semarang mendapatkan hasil nilai indeks keberlanjutan sebesar 42,94 yang mana masuk kedalam interval keberlanjutan antara nilai indeks 25-49,99 sehingga dikategorikan bahwa pengelolaan DAS Garang kurang keberlanjutan.
2. Kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan DAS Garang yang dianalisis dengan pendekatan *Soft System Methodology* (SSM) diantaranya adalah: (1) adanya konflik DAS; (2) perbedaan kepentingan, tujuan dan prioritas; konsep dan praktik kolaborasi serta aksi kolektif dalam pengelolaan DAS yang lemah; (3) lemahnya koherensi, integrasi, dan koordinasi pengelolaan; (4) keterbatasan anggaran dan (5) kurangnya penerapan STI (Sains, Teknologi dan Inovasi) pada pengelolaan DAS Garang Kota Semarang.
3. Pengelolaan DAS Garang Berkelanjutan dapat dicapai dengan adanya koherensi, integrasi, koordinasi serta kolaborasi dan aksi kolektif antar stakeholder dalam mengelola DAS didukung dengan adanya kebijakan dan regulasi dengan prinsip GEG selain itu dengan adanya dukungan penerapan STI yang mana didalam penelitian ini adalah berbasis *Low Impact Development* (LID).

5.2. Saran

Saran terkait penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) PDAM Tirta Moedal Kota Semarang : dalam hal ini sebagai pemanfaat DAS Garang perlu mempercepat proses pembangunan dan pengoperasian IPAL sehingga limbah sisa hasil penjernihan air baku minum dapat terolah dan tidak dibuang secara langsung ke badan sungai yang dapat mencemari air.

- (2) UPT TPA Jatibarang: memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Langkah awal dengan perbaikan kolam pengolahan lindi agar bisa beroperasi sebagaimana mestinya kemudian melakukan pengembangan pengolahan sampah yang sebelumnya *open dumping* menjadi penggunaan *incinerator* pembakar sampah ramah lingkungan.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang: yang memiliki tugas terkait urusan bidang lingkungan hidup harus bertindak tegas terhadap praktik-praktik pencemaran yang berdampak terhadap keberlangsungan DAS sebagai penyedia sumberdaya air. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak hanya sebatas pemantauan kualitas air sungai saja, namun dengan melakukan upaya pencegahan kerusakan DAS melalui kegiatan pembersihan sungai, konservasi sungai, pemberian sanksi tegas terhadap aktor pencemar, dan penerapan teknologi tepat guna berbasis alam salah satunya LID melalui pembangunan *Riparian Buffer* yaitu vegetasi yang memperlambat aliran air ke sungai, serta mengurangi erosi, sedimentasi dan polusi saluran air.
- (4) DLHK Provinsi Jawa Tengah: yang berperan dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu menyusun formulasi kebijakan baru melalui pengkajian UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS yaitu dengan merevisi UU Nomor 23 Tahun 2014 serta membentuk UU dan PP terkait DAS yang dikolaborasikan dengan UU dan PP SDA (sumberdaya air).
- (5) BBWS Pemali Juwana: yang berfungsi dalam menyusun program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, perlu mengikutsertakan dan membangun aksi kolaboratif dengan stakeholder pengelola DAS lainnya agar tercipta koherensi, integrasi dan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan DAS yang tidak terpisahkan melalui pembersihan sempadan sungai yang dimanfaatkan selain untuk keberlangsungan sungai (vegetasi), pemantauan sistem hidrologi dan ekologi sungai serta memberikan bimbingan

teknis pengelolaan sumber daya air dan DAS pada level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

- (6) BPDASHL Pemali Jratun: dalam menjalankan fungsi penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan DAS serta penguatan kelembagaan, maka perlu menjalin kemitraan strategis dengan stakeholder, CSR (KADIN: Kamar Dagang dan Industri), serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan DAS. Berupa pengadaan sekolah sungai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pengelola DAS dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya DAS melalui program sekolah sungai inovatif dengan metode pembelajaran berbasis alam (DAS).

Selain saran diatas perlu juga adanya riset keberlanjutan pengelolaan DAS lanjutan dengan melengkapi atribut terkait dimensi lingkungan dan ekonomi untuk penentuan kategori keberlanjutan serta memberikan rekomendasi pada tataran teknis terkait dimensi lingkungan dan ekonomi untuk peningkatan status keberlanjutan DAS

